

BAB I

”KEPENTINGAN INTERVENSI AMERIKA TERHADAP KONFLIK INTERNAL DI LIBYA TAHUN 2011”

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis memilih judul tersebut karena ketertarikan penulis atas dinamika konflik sosial-politik internal yang terjadi di wilayah maghrib Afrika utara, obyek yang penulis ambil yaitu negara Libya yang mana negara ini terbilang kaya dengan hasil buminya. Namun kekayaan itu tak sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat Libya, dikarenakan negara Libya ini dipimpin seorang dictator dibawah kepemimpinan Khadafi. Sehingga terjadilah demo besar – besaran yang berujung konflik yang tak terelakan antara masyarakat dan pro khaddafi.

Selain itu, pokok kajian yang akan diteliti oleh penulis sesuai dengan konsentrasi dan fokus penulis dalam perkuliahan, yakni mengenai resolusi konflik dalam dunia dan negara-negara islam. Seperti yang diketahui, banyaknya negara-negara besar saat ini telah menginvasi baik itu secara terbuka maupun terselubung. Sehingga dikemudian hari bisa menjadi bom waktu dan meletusnya perang terbuka, akan mengakibatkan korban

dan kerugian yang terlibat maupun negara tetangga yang tidak ikut andil. Peran penting resolusi konflik inilah yang menjadi sebuah hal berharga dalam perdamaian. Oleh karena itu dalam menganalisis salah satu contoh kasus ini akan menjadi bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan analisis resolusi konflik khususnya hubungan antara Amerika sebagai negara adidaya kepada negara-negara kecil di wilayah magrib afrika utara, khususnya Libya.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang :

Pertama, Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisa Berbagai Kepentingan Intervensi Amerika Serikat dalam Konflik Internal di Libya

Kedua, Penelitian ini Untuk Memaparkan Kepentingan Amerika Serikat dan Tujuan Amerika Serikat dalam konflik internal di Libya.

Ketiga, tujuan penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat, termasuk kepulauan Hawaii di lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya. Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan kolonial pertama yang sukses dalam melawan kekuatan Eropa. Warga Amerika telah mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan ideologi.

Amerika Serikat adalah negara federasi tertua di dunia yang masih tetap bertahan sampai saat ini. Amerika Serikat merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan, "dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang". Pemerintahan diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat sumber hukum tertinggi Negara, Amerika Serikat di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideology liberalism dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan mewujudkan tatanan dunia baru. Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia.¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat#cite_note-WF-7

Langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan kapitalisme sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, Amerika Serikat melakukan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasional. Amerika Serikat dan sekutunya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, Amerika Serikat tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dari sana, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, Amerika Serikat dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut. Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideology kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Deklarasion of Human Right*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.

Beberapa aktor yang memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu :

1. Presiden berperan sebagai penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres)
2. Kongres berperan dalam menunjuk duta besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh presiden.
3. Senat dan *house of representative* berperan dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya
4. Departemen berperan dalam penyelenggaraan secara *administrative* politik luar negeri Amerika Serikat.

Dalam menjalankan politik luar negeri melalui penyebaran demokrasi, Amerika Serikat meluncurkan program-program bantuan kepada negara-negara berkembang, termasuk bantuan keamanan. Salah satu program bantuan keamanan dimaksud adalah U.S. *Security Assistance*. Dengan penyebaran demokrasi keseluruh penjuru dunia yang dilandasi oleh semangat manifest destiny, maka persoalan kepentingan nasional AS adalah identik dengan kepentingan globalnya. Dengan demikian bangsa Amerika memandang bahwa kepentingan nasional adalah terutama ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi warganegaranya. Dan oleh karena itulah keamanan nasional merupakan bagian utama dari kepentingan nasionalnya. Keamanan nasional tersebut benar-benar dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan nasional adalah dengan cara ekspansi atau membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengupayakan terciptanya dunia yang aman, damai, dan sejahtera.

Pada tahun 1951, Libya dipimpin oleh Raja Idris melalui persetujuan yang dilakukan Inggris dan Amerika. Hubungan antara Amerika Serikat dan Libya pada saat itu terjalin cukup baik. Namun, pada akhir era 50an ditemukan ladang minyak di Libya oleh perusahaan minyak Amerika dan Italia yaitu, *Esso* dan *Eni*. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat dan Italia mendapat bagian untuk eksplorasi minyak di Libya yang berujung pada kerusuhan dan pemberontakan golongan nasionalis.

Pada tahun 1969, Kolonel Khaddafi berhasil mengkuadeta Raja Idris dan menobatkan diri sebagai pemimpin Libya. Kebijakan Khaddafi yang melakukan nasionalisasi asset milik asing termasuk milik Amerika dan Italia yang sedang memiliki kepentingan ekplorasi minyak di Libya atas pemberian Raja Idris serta mengevakuasi pangkalan militer Inggris dan Amerika dari Libya. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Libya menjadi tidak harmonis.

Pada tahun 1980 terjadi bentrokan militer antara Amerika Serikat dan Libya, dimana Libya menyerang kepangkalan laut Amerika Serikat yang dibalas dengan penghancuran instalasi militer Libya dikawasan pesisir. Presiden Amerika Serikat ketika itu Ronald Reggan mendukung kegiatan *clandestain* terhadap Libya, seperti propaganda, sabotase dan penyebaran berita bohong dan dukungan kelompok oposisi.

Pada tahun 1982, Amerika menerapkan sangsi terhadap Libya berupa embargo minyak dan pembekuan asset milik Libya serta larangan transaksi perdagangan dan keuangan dengan Libya. Hal ini memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Libya.

Pada tahun 2011, kondisi dalam negeri Libya menghadapi tekanan berupa aksi unjuk rasa pada bulan Maret. Aksi demonstrasi ini meniru aksi yang terjadi di Aljazair, Tunisia, dan Mesir. Rakyat Libya menuntut pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi turun dari jabatannya yang telah dipimpinnnya selama 42 tahun. Unjuk rasa terjadi diberbagai kota di Libya, seperti Tripoli, Tajoura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Sirte, Al Bayda, Benghazi, Bin Jawed, Bani Walid, Ar Rajban, dan Misratah. Unjuk rasa ini telah memakan korban jiwa sebanyak 165 orang, termasuk anak-anak. Kebanyakan penduduk Libya lari ke 2 negara terdekat, Tunisia dan Mesir. Ada juga warga asing yang melarikan diri dari Libya, yaitu dari Indonesia, Cina, Filipina, dan lain-lain.²

Dalam Prosesnya, Krisis di Lybia semakin menjadi dan semakin memperkeruh keadaan sosial dan masyarakat di Libya sendiri. Kearogansian kediktatoran Qadhafi semakin membuat pemberontakan kontra Qadhafi semakin menguat dan menjadi sumber konflik yang baru.

Krisis Libya mulai terjadi pada bulan Februari 2011. Pemicu munculnya demonstrasi dan pemberontakan ini dinilai tidak hanya sekedar karena masalah kebebasan, namun juga karena faktor ekonomi. Kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang semakin tinggi memicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Khaddafi. Khaddafi sendiri dianggap telah melakukan korupsi selama 41 tahun pemerintahannya. Sebagai presiden yang telah menjabat dalam kurun waktu yang lama, Khaddafi dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dalam kebijakannya.

² <http://www.kompasiana.com/bangnasr/libya-semakin-masuk-ke-kubangan-konflik-internal> di akses pada 6/20/2016 12:05 AM.

Meskipun Libya merupakan salah satu negara Arab yang kaya akan minyak, kekayaan sumber daya alam ini tidak mengalir kepada rakyat. Sebagian besar pendapatan negara dari minyak justru masuk ke dalam pundi-pundi Khaddafi, keluarga Khaddafi, serta para kroninya.

Dalam perkembangan krisis politik ini, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu loyalis Khaddafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (*National Transition Council*). Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Kubu loyalis Khaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Khaddafi sementara kubu oposisi menginginkan Khaddafi turun dari tahta kekuasaannya. Aksi saling menyerang antara dua kubu ini pun tak terelakkan. Khaddafi mengecam dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagai gerakan pemberontak. Gerakan pemberontak yang menuntut Khaddafi untuk turun ini disebut sebagai gerakan revolusioner. Khaddafi lebih memilih pendekatan represif dalam menangani krisis politik tersebut. Khaddafi mengerahkan tentara sewaan dari *Chad* dan Korea Utara untuk menembaki demonstran. Jumlah korban tewas pun berjatuhan.

Adanya serangan pemerintah Khaddafi terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan. PBB pun mengeluarkan resolusi 1973 yang mengizinkan anggota PBB untuk menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah Khaddafi. Resolusi tersebut memberikan kewenangan untuk melanjutkan serangan udara dan rudal melawan Khaddafi. Berdasarkan resolusi tersebut, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pun juga ikut melakukan intervensi dengan alasan

ingin menjaga perdamaian dan demokrasi di Libya serta melindungi warga Libya dari serangan maupun ancaman serangan. Dengan landasan tersebut, NATO menyerang pangkalan-pangkalan militer pasukan loyalis Khaddafi.

Dampak adanya krisis politik ini nyatanya tak hanya dirasakan oleh masyarakat Libya, tapi juga oleh masyarakat dunia. Dampak yang dirasakan terutama dalam hal pasokan energi minyak dan gas dunia. Banyak perusahaan minyak yang berinvestasi disana menghentikan produksi. Harga minyak dipasaran dunia pun mengalami kenaikan. Libya memang memiliki peran teramat penting bagi keamanan energi dunia, bagi negara-negara Barat terutama Amerika Serikat yang sangat tergantung dengan pasokan minyak dari Libya. Adanya krisis politik menyebabkan tidak terjaminnya pasokan minyak bagi kepentingan mereka. Apalagi, minyak yang diekspor Libya dinilai sebagai minyak jenis terbaik dan banyak dibutuhkan perusahaan maupun industri di negara-negara Barat.³

Menanggapi krisis Libya tersebut, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Barack Obama menyusun strategi, yakni menggunakan kekuatan militer sebagai *last resort* dan berkoalisi dengan pihak yang lebih luas, serta mendapat legitimasi dari Dewan Keamanan PBB. Dengan strategi tersebut, Amerika Serikat memiliki tujuan jangka pendek, yakni untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Muammar Khaddafi terhadap rakyat sipil Libya, serta tujuan jangka panjang untuk melengserkan Khaddafi dari kepemimpinan di Libya. Amerika Serikat pun berhasil mencapai kedua tujuan tersebut melalui kebijakan *humanitarian intervention*. *Humanitarian intervention* yang

³ <http://dunia.vivanews.com/news/read/204953-giliran-pemimpin-libya-digoyang-demonstrasi> diakses pada tanggal 6/20/2016 12:09 AM

dilakukan oleh Amerika Serikat di Libya sangat menekankan norma *Responsibility to Protect* (RtoP) yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama kepemimpinan Khaddafi. Kemudian pada 4 Agustus 2011, pemerintahan Obama mengeluarkan *Presidential Study Directive on Mass Atrocities* (PSD-10). PSD-10 mendefinisikan *mass atrocities* sebagai inti kepentingan akan keamanan nasional dan inti tanggung jawab moral dari Amerika Serikat. PSD-10 ini mencakup beberapa tindakan dalam menghadapi *mass atrocities* seperti tidak bertindak sama sekali, diplomasi preventif, sanksi ekonomi dan finansial, embargo senjata dan tindakan pemaksaan.⁴

Selain itu, Amerika Serikat menggunakan strategi intervensi militer di Libya dengan dalih kemanusiaan, yakni *Operation Odyssey Dawn*. Operasi militer ini dilaksanakan sebagai bentuk *enforcement* dari resolusi PBB 1973, yang diadopsi pada 17 Maret 2011, yakni Bab VII dari Piagam PBB yang mengesahkan penggunaan kekuatan militer, termasuk penegakan aturan *no-fly zone* Dan untuk melindungi rakyat sipil di Libya. Operasi militer AS di Libya juga disebut dengan *Operation Odyssey Dawn* (OOD) yang didefinisikan oleh *James G. Foggo* dan *Michael Beer* (2013: 92). Adalah ebagai respon yang dikeluarkan oleh AS atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973, yang menyerukan adanya pembentukan sebuah *no-fly zone* atas Libya dan perlindungan warga sipil dari ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh militer yang digerakan oleh Khaddafi.

⁴ (Patrick, 2011).

Operation Odyssey Dawn ini secara bertahap mengintegrasikan lebih banyak elemen dari intervensi militer multinasional dalam menanggapi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Sehingga pada perkembangannya semakin banyak negara yang tergabung dalam operasi ini, namun meskipun begitu operasi ini masih dianggap operasi militer Amerika Serikat semata, mengingat Amerika Serikat menjadi komando utamanya. Kelemahan dari *Operation Odyssey Dawn* (OOD) ini dijelaskan oleh *Quartararo et al.* (n.d: 145) sebagai: “*U.S. solo intervention in Libya could be perceived by some in the Muslim world community as another U.S. attack on Islam*”. Hal ini mengingat AS disini dianggap oleh dunia internasional sebagai satu-satunya aktor dalam operasi yang dijalankannya tersebut.⁵

D. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar Belakang Masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Mengapa Amerika Serikat Intervensi Konflik Internal Di Libya ?

E. KERANGKA PEMIKIRAN / TEORI YANG DI GUNAKAN

Disini penulis menggunakan aplikasi teori dan konsep yaitu: “kepentingan nasional (*national interets*) dan kebijakan politik luar neger (*foreign policy*).” Yang mana menurut penulis teori/konsep ini sangat cocok untuk menjawab rumusan masalah diatas.

⁵ Ibid.

1. KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (*mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah*) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya, kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara, sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai: ”Kepentingan Nasional”.

Menurut Morgenthau :

”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.

Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/Negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang *relative* tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (*mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah*) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu meliputi keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

merupakan inti dari Hubungan Internasional. Di balik suatu interaksi tentu ada kepentingan yang melatarbelakangi interaksi tersebut. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, juga memiliki kepentingan yang melatarbelakangi mereka dalam melaksanakan hubungan Internasional dengan negara lain. Kepentingan tersebut umumnya disebut dengan national interest atau kepentingan nasional. *Interest* merupakan salah satu dari esensi Hubungan Internasional disamping *actors* dan *power*. Tidak ada definisi pasti mengenai kepentingan nasional. Namun pada intinya, konsep kepentingan nasional merujuk pada tujuan

kesejahteraan pemerintah nasional pada tingkat internasional, seperti penjagaan kemerdekaan politik dan integritas teritorial.⁶

Tokoh yang menjelaskan konsep kepentingan nasional pertama kali yaitu Hans Morgenthau dengan pendekatan realisnya.⁷ Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Pengertian kepentingan nasional dapat dijelaskan dalam dua aspek yaitu :

- a. Pertama, kepentingan nasional adalah kebaikan bersama bagi masyarakat. Definisi ini melihat masyarakat sebagai sebuah komunitas, dengan hubungan yang saling menghormati, menghargai, serta mengikat anggotanya secara bersama-sama. Dengan kata lain, kepentingan nasional pada aspek ini dilihat secara umum. Yaitu sebagai ungkapan untuk kebaikan bersama bagi masyarakat.
- b. Kedua, kepentingan nasional merujuk pada prinsip berdiplomasi yang mengedepankan kebaikan bersama dari masyarakat dalam hubungannya dengan unit nasional lainnya sebagai tujuan akhir dari aksi diplomasi. Dalam hal ini

⁶ Oppenheim, 1987 : 370

⁷(Hyndman, 1970/1971 : 7).

kepentingan nasional merupakan tujuan negara yang ingin mempertahankan atau menambah kekuasaannya.⁸

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *foreign policy* atau kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Dalam menjalankannya, kepentingan nasional harus dilandasi dengan rasionalitas dan moralitas. Jika pelaksanaan kepentingan nasional hanya dilandasi oleh rasionalitas, suatu kepentingan nasional bisa saja tidak bermoral karena rasionalitas mengacu pada preferensi aktor itu sendiri. Moralitas dapat menjawab hal ini, dengan dilaksanakannya *national interest with morality*, kepentingan nasional akan dijalankan sesuai dengan moral-moral yang berlaku dalam masyarakat.⁹

⁸ .⁸ (Clinton, 1986 : 497-500).

⁹ (Oppenheim, 1987 : 371-3).

Misalnya pemerintahan yang bersifat diktator. Menurut pemerintah, kediktatoran merupakan hal yang rasional karena dengan sistem tersebut, pemerintah dapat dengan mudah mengatur negara. Namun, kediktatoran melanggar moral seperti hak asasi manusia.

Menurut Nuechterlein, ada dua kepentingan dasar yang memotivasi suatu negara untuk menjalankan kepentingan nasional, yaitu:

a. kepentingan pertahanan;

Kepentingan pertahanan yaitu kepentingan suatu negara untuk melindungi bangsa-negara dan penduduk dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain.

b. kepentingan ekonomi;

Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan suatu negara untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain. Dimensi atau sudut pandang dari kepentingan nasional terbagi menjadi *core / basic / vital interest* (kepentingan vital) dan *secondary interest* (kepentingan sekunder).

Pertama, kepentingan vital merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Contohnya yaitu melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara.

Kedua, kepentingan sekunder meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya. Misalnya dengan jalan perundingan, aktor utamanya adalah kepentingan nasional Amerika terkait ekonomi di Libya. Pertama, hubungan Amerika Serikat dan Libya yang tidak baik, terutama pada saat kepemimpinan rezim Qadhafi.

Hal ini dikarenakan Qadhafi memiliki cita-cita pembentukan negara Uni-Afrika yang bertujuan membuat negara-negara Afrika lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan asing, sehingga Amerika Serikat melihat ide Qadhafi ini sebagai ancaman kekuasaan Amerika atas negara-negara di Afrika. Selain itu, Qadhafi dianggap sukses membawa Libya pada perkembangan ekonomi dengan membuat sistem pengairan yang menyebabkan membaiknya hasil produksi pertanian, sehingga Libya tidak perlu lagi banyak mengimpor bahan-bahan makanan dari negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Alasan terakhir adalah karena sumber daya minyak yang dimiliki oleh Libya yang akan sangat menguntungkan apabila Amerika dapat menguasai cadangan minyak tersebut. Oleh karena itu, adanya krisis politik di Libya ini dianggap sebagai momentum yang tepat bagi Amerika Serikat untuk menyingkirkan rezim Qadhafi, lalu menanamkan kekuatan sebesar-besarnya di Libya.¹⁰

¹⁰ Patrick, 2011).

2. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

Untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka sebuah negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diterapkan harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional negaranya. Meminjam istilah Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. *foreign policy* merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional. Serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.¹¹

K J Holsti mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara

¹¹ Anak Agung Banyu Perwita, dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk

mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Terdapat lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri AS, kelima landasan itu adalah:

1. ***External Sources*** (sumber eksternal) meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *External Sources* mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara
2. ***Societal Sources*** (sumber masyarakat) yaitu seluruh karakteristik sosial domestic dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, opini publik, dan lain - lain.
3. ***Governmental Sources*** (sumber pemerintah) meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan - pertimbangan akan pilihan *foreign policy* baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak - pihak didalam pemerintahan.

4. **Role Sources** (sumber peranan), role disini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
5. **Individual Sources** (sumber individu) meliputi nilai - nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latarbelakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter, dan lain - lain. Hal - hal inilah yang mempengaruhi persepsi, pilihan - pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambil keputusan dari pengambil keputusan yang lain.

F. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil dugaan atau kesimpulan sementara, bahwa Amerika Serikat Intervensi konflik internal di Libya dikarenakan: “Kepentingan nasional Amerika Serikat terkait Ekonomi di Libya, yang mana negara ini kaya akan minyak.”

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan sejak adanya peristiwa konflik internal di Libya pada tahun 2011. Dimana Moammar Khadafi sebagai Pemimpin Libya dituntut untuk mundur oleh kelompok dan sebagian besar masyarakat Libya dikarenakan terdapat krisis ekonomi dan kemanusiaan yang berkepanjangan sehingga keadaan ini memicu terjadinya konflik internal yang banyak menelan korban jiwa dikalangan kelompok Pro

dan Kontra Khadafi. Atas kejadian ini, Amerika Serikat turut serta mengintervensi gejala konflik di Libya dengan menurunkan sebagian besar pasukannya di NATO dan melakukan kebijakan luar Negerinya terhadap krisis dan konflik di Libya.

H. METODOLOGI PENELITIAN / TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurna-jurnal, surat kabar, website dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, Koran, website dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahasan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan.

Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan memaparkan sejarah Amerika Serikat, dan politik luar negeri Amerika Serikat

Bab III penulis akan memaparkan secara lugas kebijakan intervensi Amerika Serikat di Libya.

Bab IV penulis akan memaparkan Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat terkait minyak di Libya

Bab V penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yang juga merupakan pembahasan terakhir atau penutup